



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**
NOMOR KEP.63/M.PPN/HK/04/2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**
NOMOR KEP. 43/M.PPN/HK/07/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI INTERNAL PEMERINTAH
UNTUK *GLOBAL PULSE LAB* JAKARTA

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat koordinasi dan konsolidasi internal Pemerintah dalam pengembangan inovasi dan terobosan dalam memanfaatkan data besar dan terkini secara *real time* pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 15 Agustus 2012 perihal *Global Pulse Lab* Jakarta, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Internal Pemerintah untuk *Global Pulse Lab* Jakarta;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Internal Pemerintah untuk *Global Pulse Lab* Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.43/M.PPN/HK/07/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI INTERNAL PEMERINTAH UNTUK *GLOBAL PULSE LAB* JAKARTA.**

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Internal Pemerintah untuk *Global Pulse Lab* Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Internal Pemerintah untuk *Global Pulse Lab* Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2018

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**
ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.63/M.PPN/HK/04/2018
TANGGAL 26 APRIL 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI INTERNAL PEMERINTAH UNTUK *GLOBAL PULSE LAB* JAKARTA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputy Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputy Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputy Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Deputy Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Deputy Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Inspektur Utama, Bappenas;
10. Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;
11. Danang Rizki Ginanjar, Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota ...

Anggota

- : 1. Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Budaya, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Pemukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Kepala Pusat Analisis Kebijakan, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Kepala Subdirektorat Pendidikan Tinggi, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Kepala Subdirektorat Pengembangan Kewirausahaan dan Ketrampilan Usaha, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Kepala Subdirektorat Pembiayaan dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Kepala Subdirektorat Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan Kemaritiman, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Kepala Subdirektorat Ketenagalistrikan, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Kepala Subdirektorat Perkotaan, Kementerian PPN/Bappenas;

21. Kepala ...

21. Kepala Subdirektorat Perencanaan Pendanaan Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Kepala Bidang Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Elektronik, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Kepala Sub Bidang Pengembangan Tata Kelola Teknologi Informasi, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Kepala Sub Bidang Pengembangan Prasarana TIK, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Kepala Sub Bidang Penyajian Data dan Informasi Elektronik, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Zulfakar, S.Kom, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Rezafaraby, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
30. *Manager Pulse Lab* Jakarta.

- D. TENAGA PENDUKUNG** : 1. Diah Triastuti, S.Ikom, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Dedeh Heni Herlina, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Afini Mahabas, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Taufik Muhlis, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Endang Retno Dumilah, SAP, Kementerian PPN/Bappenas.
6. Aprilia Dian Permatasari, S.IK, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati